

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan berasal dari kata *didik*, yaitu memelihara dan memberi latihan. Hampir semua orang dikenai pendidikan dan melaksanakan pendidikan. Sebab pendidikan tidak pernah terpisah dengan kehidupan manusia. Anak-anak menerima pendidikan dari orang tuanya dan manakala anak-anak ini sudah dewasa dan berkeluarga mereka juga akan mendidik anak-anaknya. Begitu pula di sekolah dan perguruan tinggi, para siswa dan mahasiswa di didik oleh guru dan dosen pendidikan adalah khas milik dan alat manusia. Tidak ada makhluk lain yang membutuhkan pendidikan.¹

Untuk lebih jelasnya pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan bertujuan untuk mengembangkan kualitas manusia. Sebagai suatu kegiatan yang sadar akan tujuan, maka dalam setiap jenis dan jenjang pendidikan. Semuanya berkaitan dalam suatu sistem pendidikan yang integral.

Pendidikan sebagai suatu sistem, tidak lain dari suatu totalitas fungsional yang terarah pada suatu tujuan. Setiap sub sistem yang ada dalam sistem tersusun dan tidak dapat dipisahkan dari rangkaian unsur-unsur atau komponen-komponen yang berhubungan secara dinamis dalam suatu kesatuan.

¹Pidarta Made, “*Landasan Pendidikan (Stimulasi Pendidikan Bercorak Indonesia)*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 1.

Menurut Helen dalam bukunya yang berjudul bimbingan dan konseling mengatakan bahwa di dalam kegiatan pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan formal, pada umumnya sekurang-kurangnya ada tiga (3) ruang lingkup kegiatan, yaitu bidang instruksional, bidang administrasi/kepemimpinan, dan bidang pembinaan pribadi. Untuk lebih jelasnya akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Bidang instruksional dan kurikulum. Bidang ini mempunyai tanggung jawab dalam kegiatan pengajaran dan bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan sikap kepada peserta didik. Pada umumnya bidang merupakan pusat kegiatan pendidikan dan merupakan tanggung jawab utama staf pengajaran (staf edukatif).
2. Bidang administrasi dan kepemimpinan. Bidang ini merupakan bidang kegiatan yang menyangkut masalah-masalah administrasi dan kepemimpinan, yaitu masalah yang berhubungan dengan cara melakukan kegiatan secara efisien. Di dalam bidang ini terletak tanggung jawab dan otoritas proses pendidikan yang pada umumnya mencakup kegiatan-kegiatan seperti perencanaan, organisasi, pembagia tugas staf dan pengawasan (supervisi). Pada umumnya bidang ini mempunyai tanggung jawab pimpinan dan para petugas administrasi lainnya.
3. Bidang pembinaan pribadi. Bidang ini mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan agar para peserta didik memperoleh kesejahteraan lahiriah dan batiniah dalam proses pendidikan yang sedang ditempuhnya, sehingga mereka dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Bidang ini terasa sangat penting sekali sebab, proses belajar hanya akan berhasil dengan baik, apabila peserta didik dalam keadaan sejahtera, sehat, dan dalam tahap perkembangan yang optimal.²

Kegiatan pendidikan yang baik dan ideal, hendaknya mencakup ketiga bidang tersebut. Sekolah atau lembaga pendidikan yang hanya berjalan program kegiatan bidang instruksional (pengajaran) administrasi saja, tanpa memperhatikan kegiatan pembinaan pribadi peserta didik, mungkin hanya akan menghasilkan individu yang pintar dan cakap, serta bercita-cita tinggi, tetapi mereka kurang mampu dalam memahami potensi yang dimilikinya, dan kurang/tidak mampu untuk mewujudkan dirinya di dalam masyarakat.

²Hallen A, *Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Quantum Teaching, cet. III 2005), h. 63.

Hal tersebut menyebabkan mereka mengalami kegagalan dan kesukaran sewaktu terjun ke masyarakat atau lapangan kerja, meskipun nilai rapor atau IP (indeks prestasi) yang memperolehnya cukup tinggi. Hal inilah penyebabnya timbul apa yang sering disebut sebagai, “pengangguran intelektual atau sarjana tidak siap pakai” dan lain sebagainya. Dalam kondisi seperti inilah dirasakan perlunya pelayanan bimbingan dan konseling.

Shertzer dan Stone mendefinisikan bimbingan dan konseling adalah proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu memahami diri dan lingkungan. Sejalan dengan itu Sunaryo Kartadinata mengartikannya sebagai, “proses membantu individu untuk mencapai perkembangan optimalnya”.³

Dalam keseluruhan proses pendidikan, program bimbingan dan konseling merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dipisahkan dari program pendidikan pada umumnya. Apalagi pada situasi sekarang ini dimana fungsi sekolah atau lembaga pendidikan formal itu tidak hanya membekali para siswa dengan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga mempersiapkan para peserta didik untuk memenuhi tuntutan perubahan serta kemajuan yang terjadi dilingkungan masyarakat. Sebagaimana penjelasan tersebut, bahwa perubahan dan kemajuan ini akan menimbulkan masalah, khususnya bagi para peserta didik itu sendiri, dan pada umumnya bagi pihak-pihak yang terlibat di dalam dunia pendidikan. Para peserta didik akan menghadapi masalah belajar, masalah penyesuaian diri, masalah pribadi, dan masalah sosial dan lain sebagainya yang membutuhkan penanganan dan bantuan dari bidang pembinaan pribadi yang merupakan integral dari keseluruhan sistem pendidikan formal.

³Syamsu Yusuf & Juntika Nurihsan, *Landasan Bimbingan dan Konseling*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h. 6.

Dalam kondisi seperti inilah dirasakan diperlunya layanan bimbingan dan konseling yang memfokuskan kegiatannya dalam membantu para siswa secara pribadi agar mereka dapat berhasil dalam proses pendidikan yang sedang ditempuhnya. Dengan melalui proses pelayanan bimbingan dan konseling yang baik, maka setiap peserta didik diharapkan mendapat kesempatan mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya seoptimal mungkin sehingga mereka dapat menemukan kebahagiaan pribadi dan manfaat sosial. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa program pelayanan bimbingan dan konseling berusaha untuk dapat mempertemukan antara kemampuan individu dengan cita-cita serta dengan situasi dan kebutuhan masyarakat.

Secara umum dapat dilihat peranan layanan bimbingan dan konseling dalam pendidikan, yakni sesuai dengan urgensi dan kedudukannya, maka ia berperan sebagai penunjang kegiatan pendidikan lainnya dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah digariskan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003. Peran ini dalam bentuk membantu para siswa untuk mengembangkan kompetensi religius, kompetensi diri, dan kompetensi sosial, serta membantu kelancaran para peserta didik dalam mengembangkan kompetensi akademik profesional sesuai dengan bidang yang ditekuninya melalui layanan bimbingan dan konseling.

Layanan bimbingan dan konseling yang efektif tidak mungkin terlaksana dengan baik tanpa adanya kolaborasi (kerjasama) antara guru pembimbing (konselor) dengan pihak-pihak yang terkait baik didalam maupun di luar sekolah.

Kolaborasi berasal dari bahasa Inggris "*colaborative*" atau "*colaboration*" yang artinya kerja sama. Menurut Prayitno, kerjasama

antar personil sekolah tugas dan perencanaan masing dalam pelayanan bimbingan dan konseling adalah sangat vital, tanpa kerja sama antara personil kegiatan bimbingan konseling akan banyak mengalami hambatan.⁴

Untuk terlaksananya layanan bimbingan konseling disekolah guru bimbingan (konselor) dapat bekerjasama dengan seluruh pihak yang terdapat disekolah tersebut seperti, kepala sekolah, guru mata pelajaran dan pelatih, wali kelas, ataupun organisasi siswa.

Kolaborasi dalam layanan Bimbingan dan Konseling adalah sesuatu hal umum dilakukan di sekolah. Salah satu keuntungan utama dari kolaborasi dibandingkan dengan bentuk usaha lain dari usaha perbaikan disekolah adalah mempermudah guru BK dalam memberikan layanan tersebut. Terutama kerjasama dengan pihak wali kelas.

Wibowo menjelaskan bentuk kerjasama guru bimbingan dan konseling dengan wali kelas untuk terselenggaranya aspek-aspek layanan yang terkait dengan kebutuhan dan aktivitas peserta didik dikelas-kelas yang dimaksud, terutama kelas yang diampu bersama oleh Wali kelas dengan Guru Bimbingan dan Konseling. Hamzah menjelaskan pula bahwa:

Wali kelas merupakan sebagai pendidik, pembelajar, dan pembimbing bagi peserta didik selama pembelajaran berlangsung yang telah dipercayakan orang tua atau wali kepadanya hendaknya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, selain itu wali kelas juga bertanggung jawab terhadap keharmonisan perilaku peserta didik dan turut menilai dan menentukan langkah-langkah kegiatan, termasuk pengembangan optimal peseta didik.⁵

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa wali kelas merupakan orang yang bertanggungjawab dalam mengelola kelas, serta dapat

⁴Fitria Kasih, Heriyanto, dkk, "Kerjasama Guru Bimbingan dan Konseling dengan Wali Kelas dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling di SMA Negeri 1 Pagai Utara Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai", dalam *Jurnal*, Program Studi Bimbingan dan Konseling STKIP PGRI Sumatera Barat, 2016, h. 2.

⁵*Ibid.*, h. 2.

merangsang peserta didik untuk belajar, serta memberikan rasa aman dan nyaman untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dari pendapat tersebut pula dapat dilihat bahwa wali kelas adalah seseorang yang tepat berkolaborasi bersama dengan konselor dalam pemberian layanan Bimbingan dan Konseling di sekolah.

SMPN 10 Banjarmasin merupakan salah satu SMP dari 34 SMPN yang ada di Kota Banjarmasin yang beralamat di Jalan Ade Irma Suryani Nasution Nomor 22 RT 20 Kelurahan Kampung Gadang Kecamatan Banjarmasin Tengah Provinsi Kalimantan Selatan.

Sekolah ini didirikan pada tahun 1979 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor. 034.1/17/1979, tanggal 1 April 1979, yang merupakan perubahan dari nama sekolah sebelumnya, yaitu Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP) Negeri 2 Banjarmasin.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Herlina Agustini, S.Pd selaku guru BK dan koordinator BK di SMPN 10, diketahui jumlah guru bimbingan dan konseling di SMPN 10 Banjarmasin adalah 4 orang dan Jumlah siswa 852 dan termasuk juga beberapa anak ABK, diketahui bahwa dengan banyaknya jumlah siswa yang terdapat di sekolah tersebut namun, tingkat kesadaran siswa untuk memanfaatkan pelayanan BK di sekolah, untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling di kelas guru BK pun hanya mempunyai 1 jam untuk mata pelajaran BK per kelas setiap minggunya. Melihat kondisi dilapangan guru BK tidak memiliki banyak waktu bertatap muka dengan siswa tentu menjadi tantangan tersendiri untuk memberikan layanan bimbingan

dan konseling yang optimal kepada siswa. Kolaborasi atau kerjasama dengan seluruh pihak dalam sekolah menjadi faktor pendukung dalam pemberian layanan bimbingan dan konseling, termasuk kolaborasi dengan wali kelas.

Dari latar belakang di ataslah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di sekolah tersebut dengan judul: Kolaborasi antara guru BK dan wali kelas dalam pemberian layanan bimbingan dan konseling di SMPN 10 Banjarmasin.

B. Definisi Operasional

1. Kolaborasi

Menurut Abu Ahmadi dalam bukunya sosiologi pendidikan mengatakan bahwa, kolaborasi adalah bentuk kerja sama di mana satu sama lain saling membantu guna mencapai tujuan bersama. Jadi kolaborasi merupakan usaha bersama dari dua orang atau lebih untuk melaksanakan suatu tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama.⁶

Kolaborasi yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh kedua pihak yaitu guru BK dan wali kelas dalam penanganan siswa bermasalah, pemberian motivasi, dan kolaborasi dalam alih tangan kasus.

2. Wali Kelas

Wali kelas adalah seorang pendidik sekaligus sebagai pengganti orang tua di sekolah. Wali kelas mempunyai peranan, tanggung jawab, dan hak dalam proses belajar mengajar pada seluruh mata pelajaran dalam kelas tersebut.⁷

⁶Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 101.

⁷Mulyadi, *Bimbingan Konseling di Sekolah & Madrasah*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), h. 394.

Wali kelas yang dimaksud penulis tidak terlepas dari pengertian yang telah dijelaskan yaitu guru yang dipercaya dan bertanggung jawab atas suatu kelas dan menjadi pihak yang bekerjasama dengan guru BK.

3. Guru BK/ Konselor

Guru BK adalah konselor sekolah atau tenaga ahli pria/ wanita yang mendapat pendidikan khusus dalam bimbingan dan konseling di perguruan tinggi, yang mencurahkan seluruh waktunya pada layanan bimbingan, serta memberikan layanan bimbingan kepada siswa dan menjadi konsultan bagi staf sekolah dan orang tua.⁸

Begitu pula guru BK yang dimaksud disini seorang guru bimbingan dan konseling atau konselor baik pria maupun wanita yang bertugas membantu dan memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada siswa, serta menjadi penanggung jawab utama dalam kegiatan kolaborasi dengan wali kelas.

4. Layanan Bimbingan dan Konseling

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, layanan berasal dari kata layan yang kata kerjanya adalah melayani yang mempunyai arti membantu menyiapkan (mengurus) apa-apa yang diperlukan seseorang; meladeni, menerima (menyambut) ajakan (tantangan atau serangan).⁹

Pengertian bimbingan menurut Rogers yang mengatakan bahwa, *“the purpose of most helping professions, including guidance counseling, is the enhance the personal development, the psychological growth toward a socialized maturity of its clients”*.¹⁰

⁸W. S. Winkel, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah*, (Jakarta: Grasindo, 2013). h. 38

⁹Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka, 1989), h. 950.

¹⁰Jhon, Paul, dkk, *Guidance An Introduction*, (U.S.A:Rand McNally Collage Publish Company, 1980),h.11

Sedangkan menurut Pietrofes, “*counseling is relationship between a professionally trained, competent counselor and an individual seeking help in gaining greater self understanding and improved decision making and behavior changing skill for problem resolution and for developmental growth.*”¹¹

Dalam penelitian ini yang dimaksud peneliti layanan bimbingan dan konseling adalah bantuan atau bimbingan yang diberikan kepada siswa agar potensinya berkembang dengan baik serta membantunya dalam menyelesaikan masalah pribadi maupun sosialnya yang dilakukan oleh guru BK dan dibantu oleh wali kelas melalui kegiatan kolaborasi di SMPN 10 Banjarmasin.

Dari definisi operasional diatas, maka dapat disimpulkan bahwasanya kolaborasi antara guru BK dan wali kelas dalam pemberian layanan bimbingan dan konseling yang dimaksud oleh penulis adalah sebuah bentuk kerja sama yang dilaksanakan oleh dua pihak yaitu guru BK dan wali kelas dengan yang bentuknya berupa penanganan siswa bermasalah, pemberian motivasi, dan alih tangan kasus, dengan adanya kolaborasi tersebut maka layanan bimbingan dan konseling dapat diberikan secara optimal kepada siswa.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk kolaborasi antara guru BK dan wali kelas dalam pemberian layanan BK di SMPN 10 Banjarmasin?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat kegiatan kolaborasi yang dilaksanakan oleh guru BK dan wali kelas dalam pemberian layanan BK di SMPN 10 Banjarmasin?

¹¹Jhon, Paul, dkk, *Guidance An Introduction.....*, h.85.

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan fokus penelitian di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bentuk kolaborasi yang dilaksanakan antara guru BK dan wali kelas dalam pemberian layanan BK di SMPN 10 Banjarmasin.
2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat kegiatan kolaborasi yang dilaksanakan oleh guru BK dan wali kelas dalam pemberian layanan BK di SMP Negeri 10 Banjarmasin.

E. Alasan Memilih Judul

Alasan dasar untuk mengangkat judul penelitian ini adalah:

1. Sebagai salah satu bidang utama dari mutu pendidikan, Bimbingan dan Konseling tentu saja sangat dirasa perlu dan bermanfaat sebagai salah satu penunjang berhasilnya tujuan pendidikan di sekolah.
2. Sebagai jantungnya bimbingan, layanan Bimbingan dan Konseling di sekolah merupakan salah satu bagian yang integral dari keseluruhan proses pendidikan di sekolah yang berorientasi pada perkembangan siswa baik pada masalah individu, kelompok, belajar dan kariernya.
3. Layanan imbingan dan konseling di sekolah sangat dibutuhkan, karena banyaknya aspek pada siswa yang memerlukan perhatian khusus dan tidak dapat dilakukan oleh selain ahli yaitu guru pembimbing atau konselor, apalagi masa SMP adalah masa peralihan bagi peserta didik dari masa kanak-kanak menuju masa remaja. Namun, tanpa adanya

kolaborasi atau kerja sama dengan pihak lain seperti halnya wali kelas, maka layanan bimbingan dan konseling tersebut tidak dapat diberikan kepada siswa secara optimal.

F. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap teori terkait kolaborasi yang dilakukan oleh guru BK dan wali Kelas dalam pemberian layanan dan bimbingan di sekolah.
2. Secara praktis, sebagai bahan masukan bagi sekolah agar dapat meningkatkan kinerja dalam kolaborasi antara guru BK dan wali kelas sehingga pendidikan semakin bermutu. Kemudian, dapat memberikan manfaat terutama dalam lembaga pendidikan, terutama bagi guru BK sebagai koreksi atau sebagai bahan untuk meningkatkan kompetensi guru BK. Bagi penulis sebagai bahan pembelajaran untuk menambah pengalaman dan wawasan dalam bidang keilmuan Bimbingan dan Konseling, serta dapat disajikan dan dijadikan acuan bagi penulis selanjutnya.

G. Penelitian Terdahulu

1. Yudha Fitriani, tahun 2017, Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negara Sunan Kalijaga, dengan judul, “Kolaborasi Guru BK dengan Wali Kelas

dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa Kelas VII di MTsN Babadan Baru Nganjuk Sleman Yogyakarta”, Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan subyek penelitian adalah guru BK, wali kelas, dan siswa. Sedangkan yang menjadi obyeknya adalah bentuk dan jenis kolaborasi guru BK dengan wali kelas. Pengumpulan data digunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kolaborasi guru BK dengan wali kelas dalam mengatasi kesulitan belajar siswa kelas VII D yaitu bentuk informal. Sedangkan jenisnya adalah kolaborasi sekunder.¹² Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah peneliti sama-sama menggunakan penelitian kualitatif, dan menjadikan guru BK dan wali kelas sebagai subyek penelitian, dan obyeknya adalah bentuk dan jenis kolaborasi guru BK dengan wali kelas. Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah kolaborasi guru BK dan wali kelas dalam mengatasi kesulitan belajar siswa dan penelitian yang penulis lakukan adalah mengenai kolaborasi antara guru BK dan wali kelas dalam pemberian layanan bimbingan dan konseling. Peneliti tidak meneliti bentuk kolaborasi tidak menjadikan siswa sebagai subyek dalam penelitian ini serta peneliti juga menjadikan faktor yang mempengaruhi dalam kolaborasi antara guru BK dan wali kelas dalam pemberian layanan bimbingan dan konseling sebagai obyek dalam penelitian ini.

¹²Yudha Fitriani, ”Kolaborasi Guru BK dengan Wali Kelas dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa Kelas VII di MTsN Babadan Baru Nganjuk Sleman Yogyakarta”, *Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negara Sunan Kalijaga, 2017. (diakses pada 17 oktober 2019, pukul 22:04).

2. Sri Wahyuningsih, Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017, dengan judul “Kolaborasi antara Guru Bimbingan dan Konseling Islam dalam Meningkatkan Spiritual Siswa SMP IT Abu Bakar Yogyakarta”, rumusan masalahnya adalah ingin mengetahui bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan oleh guru BK dan guru pendidikan islam siswa kelas VIII. Metode penelitian yang dilakukan adalah lapangan, dan hasil penelitian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling dengan guru agama islam dan upaya dalam meningkatkan spiritual siswa di SMP IT Abu Bakar Yogyakarta yaitu bentuk kolaborasi yang dilakukan ada beberapa kegiatan keagamaan diantaranya sholat dhuha, imam, dan zikir, murajaah, khidmatul masjid, dan tilawah. Sedangkan upaya dalam meningkatkan spiritual adalah membuat program, memberikan contoh dan menanggulangi pelanggaran tata tertib ibadah siswa ketika melaksanakan kegiatan ibadah tersebut. Selain itu mengajak para guru di SMP IT Abu Bakar untuk senantiasa memberikan contoh baik dengan harapan dapat beristiqamah.¹³Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini terdapat pada rumusan masalah karena ingin mengetahui bentuk kolaborasi yang dilaksanaka oleh guru BK namun perbedaannya dalam kolaborasi

¹³Sri Wahyuningsih, Kolaborasi antara Guru Bimbingan dan Konseling Islam dalam Meningkatkan Spiritual Siswa SMP IT Abu Bakar Yogyakarta, *Skripsi*, Fakultas Dakwah Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017. (diakses pada 17 oktober 2019, pukul 22:04).

tersebut peneliti tidak menjadikan guru pendidikan agama islam sebagai subjek penelitian.

3. Heriyanto & Fitria Kasih, dkk, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumatera Barat, dengan judul, “Kerjasama Guru Bimbingan dan Konseling dengan Wali Kelas dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling di SMA Negeri 1 Pagai Utara Selatan Kabupaten Mentawai”. Dari hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam membantu dan menangani peserta didik yang mendapat nilai yang rendah dan melanggar peraturan sekolah dan gejala-gejala salah asuh, konselor berkolaborasi dengan wali kelas melakukan observasi, wawancara, dan kunjungan rumah untuk mengungkap pola asuh yang diterapkan oleh orang tua peserta didik, yaitu pola asuh yang keras/ kejam dan tidak berperasaan, kemudian guru BK dan wali kelas bersama memberikan layanan bimbingan belajar dan layanan-layanan yang diperlukan oleh peserta didik sesuai dengan permasalahan yang dialaminya.¹⁴ Persamaan yang terdapat pada penelitian ini adalah, peneliti sama-sama menjadikan wali kelas sebagai subjek penelitian. Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah lokasi penelitian dan bentuk kolaborasi antara guru BK dan wali kelas yaitu dengan melakukan observasi, wawancara, dan kunjungan rumah untuk mengungkap pola asuh yang diterapkan oleh orang tua peserta

¹⁴Heriyanto & Fitria Kasih, dkk, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Kerjasama Guru Bimbingan dan Konseling dengan Wali Kelas dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling di SMA Negeri 1 Pagai Utara Selatan Kabupaten Mentawai, *Skripsi*, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumatera Barat.(diakses pada 17 oktober 2019, pukul 22:04).

didik, sedangkan bentuk kerja sama yang ingin penulis teliti adalah penanganan siswa bermasalah, pemberian motivasi, dan alih tangan kasus.

H. Sistematika Penulisan

Pembahasan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari: latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, alasan memilih judul, signifikansi penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, terdiri dari : layanan bimbingan dan konseling di sekolah, kolaborasi, guru BK, wali kelas/ guru kelas, kolaborasi antara guru bk dan wali kelas.

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari: jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, dan prosedur penelitian.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian, terdiri dari: gambaran singkat lokasi penelitian, penyajian data, analisis data.

Bab V Penutup, yang terdiri dari: simpulan dan saran.